



**PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA GUNA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN DAN KUALITAS PILKADA 2024 DI DESA SUMERTA KAUH
DENPASAR**

Bayu Adhinata^{1*}, Anastacia Patricia Novlina Nurak²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa,
Denpasar, Indonesia

*Korespondensi : bayuadhinata@warmadewa.ac.id

ABSTRAK

Program pendidikan politik memiliki tujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, terutama kepada pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2024 di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. Pendidikan Politik yang diberikan kepada pemilih pemula sejatinya berupaya agar pemilih pemula ini memiliki informasi, akses, dan kemampuan untuk menghadapi pilihannya pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Pendidikan politik menjadi kunci utama dalam meningkatkan demokrasi substansial terutama bagi pemilih pemula yang sebagian besar didominasi oleh Generasi Z ini. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan yang terdiri dari tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan target pemberdayaan, koordinasi bersama mitra dan perencanaan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pengabdian dilakukan pre-test, pelaksanaan pemberdayaan politik, dan post-test paska pemberdayaan politik. Tahap evaluasi berisi hasil evaluasi kegiatan yang didasarkan pada hasil pre-test dan post-test dan penyusunan kerangka acuan yang cocok dengan target pendidikan politik, penyusunan kerangka luaran akan diberikan pada pihak mitra yang mampu mengimplementasikan kerangka tersebut. Terdapat dua permasalahan utama yang ditemukan yakni masih rendahnya keinginan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan seperti menjadi pengawas pemilu dan masih rendahnya pengetahuan politik tentang proses politik seperti pengetahuan tentang calon-calon walikota. Hasil yang ditemukan bahwa rendahnya kesadaran berpartisipasi dikarenakan kurangnya paparan pendidikan politik informal diluar pendidikan formal serta minimnya pendidikan literasi tentang memanfaatkan gawai untuk memilih sumber informasi politik terkait dengan pilihan-pilihan politik.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Pilkada Serentak, Pendidikan Politik, Literasi Pemilu

ABSTRACT

The political education program aims to increase public insight into politics, especially for new voters in the 2024 simultaneous regional elections in Sumerta Kauh Village, East Denpasar District, Bali Province. Political education provided to new voters is actually an effort so that these new voters have information, access, and the ability to face their choices in the 2024 simultaneous regional elections. Political education is the main key to increasing substantial democracy, especially for new voters who are mostly dominated by Generation Z. The method used in this community service uses several stages consisting of three stages, namely the preparation stage, the implementation stage and the evaluation stage. The preparation stage consists of identifying problems and determining empowerment targets, coordinating with partners and planning implementation. At the implementation stage of community service, a pre-test, implementation of political empowerment, and a post-test after political empowerment are carried out. The evaluation stage contains the results of the evaluation of activities

based on the results of the pre-test and post-test and the preparation of a reference framework that matches the political education target, the preparation of the output framework will be given to partners who are able to implement the framework. There are two main problems found, namely the still low desire to be able to participate in election activities such as becoming election supervisors and the still low political knowledge about the political process such as knowledge about mayoral candidates. The results found that the low awareness of participation was due to the lack of exposure to informal political education outside of formal education and the lack of literacy education about using gadgets to choose sources of political information related to political choices.

Keywords: *Novice Voters, Simultaneous Regional Elections, Political Education, Election Literacy*

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi dan kondisi politik di Indonesia, khususnya di Bali. Program pemberian pendidikan politik bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, khususnya pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2024. Negara yang menjunjung konsep demokrasi terwujud dalam adanya penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum terlebih lagi pemilihan kepala daerah diharapkan mampu merefleksikan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, mekanisme pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal dan periodik.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan juga menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang utama yaitu sebaran dan juga pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses-proses yang utama dalam pemilihan kepala daerah. Perkembangan dunia digital di Indonesia sangat cepat. Berdasarkan hasil survei Susenas pada tahun 2020, sebanyak 90,75% persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki/menguasai minimal satu nomor telepon seluler dan sebesar 53,73% diantaranya mengakses internet (BPS, 2020). Fakta ini mendorong berkembangnya platform digital sebagai media baru yang mengakomodasi kegiatan politik.

Platform digital tidak hanya menjadi media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi mimbar untuk melaksanakan kegiatan politik terutama dari calon wakil rakyat kepada rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2022) juga menyampaikan bahwa 77% warga Indonesia atau sebanyak 210 juta orang sudah menggunakan internet. Pesatnya pertumbuhan internet serta kemampuan orang Indonesia dalam memiliki telepon seluler sayangnya tidak diimbangi dengan kemampuan memilah informasi yang baik dan aktual. Pemilihan umum serentak dari level kabupaten hingga nasional untuk pertama kalinya akan dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 2024. Dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti, diperkirakan jumlah pemilih muda atau pemilih pemula akan mencapai hampir 60% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan pemutakhiran data pemilih dari KPU pada bulan Juni tahun 2022 kemarin, terdapat 578.139 pemilih baru dari 190.022.169 orang pemilih yang sudah terdaftar (Dirgantara & Meiliana, 2022). Artinya, sekitar 500 ribu lebih merupakan pemilih baru yang pertama kalinya mengikuti pemilihan umum. Pemilih muda atau bisa juga dikatakan pemilih pemula, biasanya merupakan pemilih dengan rentang kelahiran tahun 1995-2010 yang juga disebut dengan Gen Z (generasi internet). Generasi internet ini umumnya sangat akrab dengan teknologi informasi kebaruan dan juga lebih nyaman mendapatkan informasi dari media digital.

Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal tersebut haruslah dapat dipahami oleh masyarakat terutama pemilih pemula. Maka yang harus dilakukan adalah memberi pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap kepada masyarakat pemilih. Pemilih pemula juga menghadapi kendala yang disebabkan oleh cara menandai surat suara yang selalu berubah-ubah dari satu pemilu ke pemilu yang lain dan kurangnya informasi mengenai perubahan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberi pemahaman politik melalui pemberian pendidikan politik bagi pemilih pemula guna meningkatkan kualitas demokrasi substansial menuju pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Demokrasi substansial merupakan demokrasi yang berfokus pada kepentingan rakyat, namun perlu dipastikan proses pemilu terbebas dari politik uang dan kampanye negatif yang berisi ujaran kebencian dan membawa isu SARA (Noor, 2018). Para calon kepala daerah harus dapat menyadari bahwa kehadiran mereka adalah untuk kepentingan publik luas. Bukan sekedar hanya untuk kepentingan partai pengusung dan kelompok pendukungnya. Salah satu ukuran dari demokrasi yang substantif ini adalah lahirnya kebijakan politik yang bersifat imparial yakni berkerakyatan, menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, berkeadilan, dan memiliki perhatian khusus terhadap rakyat yang kurang beruntung dalam hidupnya. Demokrasi yang prosedural selama ini telah cukup membuat kita terperangkap dalam jebakan yang berisi kegagalan partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi dan kondisi politik di Indonesia, khususnya di Bali. Pendidikan politik memiliki tujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, khususnya pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2024 di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. Pendidikan Politik merupakan kunci utama dalam memberdayakan pemilih muda. Gutierrez (1995) mengkonseptualisasikan pemberdayaan sebagai sebuah proses linier, yang membutuhkan empat sub-proses psikologis: rasa percaya diri, pengembangan kesadaran kritis, perolehan keterampilan, dan keterlibatan dengan orang lain yang serupa.

Maka dari itu pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula sejatinya berupaya agar pemilih pemula ini memiliki informasi, akses, dan kemampuan untuk menghadapi pilihannya pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Pendidikan politik menjadi kunci utama dalam meningkatkan demokrasi substansial terutama bagi pemilih pemula yang sebagian besar didominasi oleh Generasi Z ini. Sasaran dari pengabdian ini adalah pemuda yang termasuk dalam pemilih muda di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan yang terdiri dari tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan target pemberdayaan, koordinasi bersama mitra magang dan perencanaan pelaksanaan. Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri dari pengambilan data pre-test, pelaksanaan pendidikan politik, dan pengambilan data *post-test* paska pendidikan politik. Tahap evaluasi terdiri dari evaluasi kegiatan berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dan penyusunan kerangka yang cocok dengan target pemberdayaan, penyusunan kerangka keluaran akan diberikan pada pihak mitra yang mampu mengimplementasikan kerangka tersebut. Peserta yang melakukan *pre-test* dan *post-*

test dalam pendidikan politik ini adalah mereka yang hadir dalam kegiatan pendidikan politik pemilih pemula di Desa Sumerta Kauh, Denpasar. Terdapat 15 orang peserta yang berusia 17 – 24 tahun. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Kategori ini menjadi landasan pengabdian untuk mengelompokkan pemilih pemula yang menjadi peserta pengabdian kepada masyarakat ini. Sehingga, pemilih pemula dalam pengabdian ini merujuk pada peserta berusia 17-24 tahun yang sudah memiliki hak memilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ini. Peserta adalah penduduk yang berdomisili resmi dan bertempat tinggal di Desa Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar lebih dari 10 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama, masalah yang teridentifikasi di Desa Sumerta Kauh meliputi minimnya pengetahuan pemuda (pemilih pemula) terkait partisipasinya dalam proses pemilu seperti terlibat dalam pengawasan pemilu dan panitia pemungutan suara. Selain itu, terlihat juga persoalan mengenai kemampuan pemilih pemula terkait wawasan kepemiluan seperti pengetahuan soal *vote buying*, manifestasi politik uang, kampanye terselubung, sampai dengan penyebaran informasi palsu turut mewarnai beragamnya pengetahuan pemilih pemula di Desa Sumerta Kauh. Secara keseluruhan, peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian pendidikan politik ini memiliki akses terhadap informasi yang bersifat digital melalui ponsel pintar mereka. Jadi, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa baca-tulis sehingga penyampaian materi dengan tujuan menambah wawasan pemilih pemula semestinya tidak menjadi kendala.



Gambar 1. Peserta mendengarkan paparan saat sosialisasi pendidikan politik

Selanjutnya pada tahap ke dua, yakni melaksanakan pendidikan politik yang diawali dengan *pre-test* dan ditutup dengan *post-test*. Berikut ini hasil *pre-test* yang terfokus pada tiga indikator pengetahuan pemilu yang disesuaikan dengan temuan identifikasi masalah pada tahap pertama. Keempat indikator tersebut terdiri dari; tahu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, tahu apa itu *vote buying* dan politik uang, tahu apa itu kampanye terselubung/*black campaign* dan memiliki kesadaran mencari informasi dan pernah melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan.

Tabel 1. Hasil *Pre Test*

Indikator	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Pengetahuan Pemilihan Kepala Daerah	Responden ‘tahu’ kapan pemilihan umum kepala daerah di laksanakan pada tahun 2024	40	60
	Responden tahu apa itu <i>vote buying</i> dan politik uang	30	70
	Responden tahu apa itu kampanye terselubung/ <i>black campaign</i>	45	55
	Responden melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan	25	75

Hasilnya terlihat bahwa pada indikator pengetahuan pemilu yang pertama yakni tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setidaknya terdapat 60% responden yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut dari total 15 responden. Selanjutnya pada indikator pengetahuan mengenai *vote buying* dan politik uang terlihat sebanyak 30% yang mengetahui mengenai *vote buying* dan politik uang. Selanjutnya hanya 45% responden mengaku mengetahui apa itu kampanye terselubung dan *black campaign* sementara 55% lainnya tidak mencari tahu sama sekali tentang kampanye terselubung. Indikator berikutnya yakni pengetahuan responden tentang pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan, hasilnya sekitar 75% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan awal tentang pemilu pada responden yang menjadi target pendidikan politik masih cukup rendah. Pengetahuan mengenai *vote buying* dan politik uang juga masih rendah. Kemudian pengetahuan dalam hal kampanye terselubung juga dapat dikatakan masih rendah. Terakhir, pengetahuan dalam pengecekan kebenaran informasi seputar hoaks pemilu juga masih cukup rendah. Berangkat dari hasil *pre-test* ini dilaksanakan pendidikan politik yang berisi pemberian materi terkait kepilkadaan yakni:

1. Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
2. Pengetahuan tentang *vote buying* dan politik uang.
3. Pengetahuan mengenai kampanye terselubung/*black campaign*.
4. Pengetahuan pencegahan penyebaran informasi palsu.



Gambar 3. Peserta mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi dengan narasumber

Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pemberian pendidikan politik, dilaksanakan post-test yang menunjukkan hasil seperti berikut:

Tabel 2. Hasil *Post Test*

Indikator	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Pengetahuan Pemilhan Kepala Daerah	Responden ‘tahu’ kapan pemilihan umum kepala daerah di laksanakan pada tahun 2024	100	0
	Responden tahu apa itu <i>vote buying</i> dan politik uang	100	0
	Responden tahu apa itu kampanye terselubung/ <i>black campaign</i>	100	0
	Responden melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika mendapat informasi seputar pemilihan umum yang diragukan	100	0

Pada tabel 2 diatas terlihat bahwa para peserta atau seluruh responden mengalami peningkatan pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah. Hasilnya terlihat bahwa pada indikator pengetahuan pemilu yang pertama yakni tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, setidaknya dari 60% responden yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berubah menjadi 100% setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Selanjutnya pada indikator pengetahuan tentang *vote buying* dan politik uang berubah menjadi 100% responden mengaku memahami dan mengetahui mengenai *vote buying* dan politik uang. Juga pada indikator kampanye terselubung/*black campaign* berubah menjadi 100% dapat paham mengenai kampanye terselubung. Terakhir juga mengalami kenaikan, yang mana 100% responden mengaku akan dan ingin melakukan pengecekan kebenaran informasi ketika ditanyakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dari hasil pengukuran indikator pengetahuan pemilu pada *pre-test* menjadi meningkat 100% pada hasil *post-test* untuk seluruh responden yang hadir pada kegiatan pengabdian ini.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan pemahaman secara lebih menyeluruh kepada pemilih pemula melalui sosialisasi dan pemberian materi tentang teknis kepemiluan dan aspek-aspek yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Ujung dari kegiatan pengabdian dengan mengambil tema pendidikan politik guna mewujudkan demokrasi substansial ini adalah adanya peningkatan dan eskalasi kualitas partisipasi politik pemilih pemula serta terbentuknya kesadaran sebagai warganegara yang melek politik. Partisipasi politik juga adalah salah satu tolak ukur dalam demokrasi. Kemampuan memahami dinamika pemilu menjadi sangat krusial agar tetap dapat menghidupkan roh demokrasi dan juga menjadi momentum penting dalam memperbaiki demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). Pengeluaran Untuk Konsumsi Masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dirgantara, A., & Meiliana, D. (2022, July 13). *Data KPU: Ada 578.139 Pemilih Baru dari Total 190 Juta Orang*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/11090601/data-kpu-ada-578139-pemilih-baru-dari-total-190-juta-orang>
- Gutierrez, L. M. (1995). Understanding the empowerment process: Does consciousness make a difference? *Social Work Research*, 19(4), 229–237. <https://doi.org/10.1093/swr/19.4.229>
- Noor, M. (2018). Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial. *Mimbar Administrasi*, 2(1), 80-86.